

SISTEM PEMERINTAHAN DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN PADA KAMPUNG YERUBOI DISTRIK WARSA KABUPATEN BIAK NUMFOR

Asmadianto

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik YAPIS Biak

Email : Asmadianto@iyb.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pemerintahan di Kampung Yeruboi. Teknik pengumpulan data yang digunakan seperti; observasi, angket, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya kurang keterbukaan dari Pemerintah kampung, disamping itu terdapat pula kurang adanya pengawasan dari tingkat Distrik terhadap Dana kampung, Partisipasi (kurang adanya kekompakan atau kerja sama dari masyarakat), sehingga Keberhasilan Pembangunan kampung bagi kesejahteraan masyarakat belum terlaksana dengan baik di kampung Yeruboi
Kata kunci: Sistem Pemerintahan, Pembangunan, Kampung.

PENDAHULUAN

Pemerintahan kampung dan Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM) merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara desa. Keberadaan BPK dalam pemerintahan Kampung adalah bukti perlibatan masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan. Pada masa orde baru perlibatan masyarakat di dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung di laksanakan melalui pembentukan Lembaga Musyawarah Kampung (LMK) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Kampung (LKMK). Namun lembaga tersebut kurang berfungsi secara proporsional, hanya berfungsi sebagai tangan kanan dari Kepala Kampung. Pada sisi lainnya, hegemoni penguasa Kampung sangat dominan dalam segala hal. Akibatnya masyarakat kurang bisa belajar berdemokrasi. Hal ini dibuktikan dengan kekuasaan Kepala Kampung yang dapat dikatakan analog dengan kekuasaan dictator atau raja absolute, sehingga masyarakat kurang dapat secara leluasa menyalurkan aspirasinya.

Otonomi daerah telah memberikan ruang gerak bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yang menjadikan masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan tetapi juga subjek pembangunan dan dengan tingkat partisipasi tersebut diharapkan akselerasi hasil-hasil pembangunan dapat segera diwujudkan dan berdayaguna dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Partisipasi masyarakat tersebut disamping dilaksanakan oleh lembaga-lembaga non formal seperti keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kelompok-kelompok kepentingan lain melalui tuntutan-tuntutan terhadap pemerintah atau bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah, juga dilaksanakan oleh lembaga-lembaga formal pada tingkat daerah melalui kewenangan lebih besar pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan di tingkat kampung dengan pembentukan Badan Permusyawaratan kampung (BAMUSKAM). Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur

masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Dengan kata lain ide-ide tentang otonomi daerah, demokratisasi dan penghargaan atas hak-hak asasi manusia dalam pembangunan memiliki dinamika sendiri dalam implementasinya baik dipusat, daerah, dan kampung. Paradigma pembangunan yang sentralistik terbukti telah gagal dan perlu dikembangkan paradigma baru yaitu paradigma pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat secara lebih luas melalui peningkatan civil society sehingga pembangunan adalah dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat yang pada akhirnya adalah Pembangunan Bangsa secara keseluruhan, dan itu hanya dapat terjadi apabila pembangunan dimulai dari "pembangunan masyarakat kampung". "Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan kampung dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan representasi dari cita-cita luhur bangsa Indonesia yang menghendaki terwujudnya kemandirian bangsa dengan menempatkan pembangunan kampung sebagai tolak ukur pembangunan nasional.

Pembangunan biasanya didefinisikan sebagai rangkaian usaha sadar yang ditempuh oleh suatu Negara atau bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan langsung, misalnya pembangunan ekonomi, apabila pemaangunan ekonomi telah berjalan dengan baik maka pembangunan dibidang lain akan berjalan dengan baik (Siagian 2000). Untuk mewujudkan kegiatan pembangunan yang lebih demokrasi sebagai upaya dalam mendukung berjalannya roda pemerintahan, pemerintah pusat telah memberikan wewenang kepada

daerah untuk lebih menentukan nasib pembangunan daerah itu sendiri melalui undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Maksud dan tujuan undang-undang tersebut adalah menciptakan pemerataan pembangunan nasional dalam mengatasi kesengajaan antar daerah, karena dengan pembangunan itulah yang akan dapat menjangkau pelosok negeri. Daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi penyelenggaraan otonomi daerah perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintah dan antar pemerintah daerah. Secara faktual, pada perkembangannya bentuk sebagian besar kampung di Indonesia pada hakekatnya sampai sekarang masi tetap merupakan kesatuan masyarakat hukum asli, dengan berlandaskan pada aturan hukum adat. Oleh karenanya pemerintah kampung yang lahir dari sistem hukum yang berlaku bersifat demokratis sesuai dengan filosofi terbentuknya kampung dan di harapkan pemerintah kamoung dan menjalankan tiga peranan utama yaitu : sebagai struktur perantara, sebagai pelayan masyarakat, dan sebagai agen pembaharuan (Sadu Wasistiono, 2007).

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa atau kampung adalah Kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung. BAMUSKAM (Badan Permusyawaratan Kampung) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya

merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan adalah suatu usaha proses yang menyebabkan pendapatan perkapita masyarakat meningkat dalam jangka panjang. (Sukirno, 1995 : 13). Dengan demikian, proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik, yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro. Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (progress), pertumbuhan dan diversifikasi. Sebagaimana dikemukakan oleh para ahli di atas, pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).

Dengan melihat berbagai visi, dan rencana pembangunan nasional yang telah diluncurkan oleh pemerintah pusat dalam memperkuat sistem pembangunan kampung, maka pemerintah kampung sebagai penyelenggara pemerintahan kampung memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam menentukan keberhasilan pembangunan kampung. Oleh karena itu pemahaman tugas dan tanggung jawab dan segala yang menyangkut sistem pemerintahan kampung perlu mendapat perhatian.

METODE

Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di Kampung Yeruboi Distrik Warsa Kabupaten Biak Numfor pada Kantor Kampung Yeruboi.

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis atau metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif atau penelitian naturalistik adalah penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya dengan tidak berubah dalam simbol-simbol atau bilangan. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau proses menjangkau data atau informasi yang bersifat sewajarnya, mengenai suatu masalah dalam kondisi aspek, atau bidang pada obyeknya.

Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah:

a. Data primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan langsung dilapangan oleh peneliti. dalam penelitian ini peneliti melakukan tatap muka dengan Pemerintah kampung dan Tim pengelola Keuangan Kampung dan Badan Musyawarah Kampung dan beberapa elemen masyarakat yang dianggap mampu dalam memeberikan informasi yang dibutuhkan. dan melakukan wawancara, dan penyebaran kuesioner untuk mendapat data yang dibutuhkan berdasarkan kebutuhan penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu tinjauan peraturan dan perundang-undangan tentang

Pemerintahan kampung, tinjauan buku Pedoman teknis pengelolaan keuangan kampung, dan peraturan tertulis yang diterbitkan oleh pemerintah kampung tentang sistem pemerintahan. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman atau guru dalam penelitian. Informan dalam penelitian ini ialah Kepala Kampung Yeruboi, Aparat Pemerintah Kampung, dan masyarakat Kampung Yeruboi.

Teknik Pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

- a. Observasi;
- b. Interview atau wawancara; dan
- c. Pengumpulan data melalui dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Pemerintahan Dalam Meningkatkan Pembangunan Pada Kampung Yeruboi Distrik Warsa Kabupaten Biak Numfor

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yaitu untuk melihat bagaimana sistem pemerintahan dalam meningkatkan pembangunan Pada Kampung Yeruboi. dan dampak sistem pemerintahan bagi pembangunan kampung.

Hasil penelitian tentang sistem pemerintahan dalam meningkatkan pembangunan kampung dapat dikaji sebagai berikut :

1. Akuntabilitas

Kepala kampung mempunyai kedudukan sebagai kepala wilayah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kampung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala distrik dan diteruskan kepada bupati atau walikota yang bersangkutan. Akuntabilitas mempunyai arti

pertanggung jawaban yang merupakan salah satu ciri dari terapan "Good Governance" atau pengelolaan pemerintahan yang baik dimana pemikiran tersebut bersumber bahwa pengelolaan administrasi publik merupakan issue utama dalam pencapaian menuju "clean government" (pemerintahan yang bersih). Ada beberapa pilar *good governance* dalam berinteraksi satu dan lainnya yang saing terkait, yaitu: *Government*, *Citizen*, dan *Business* atau *State*, *Society* dan *Private Sector*. Akuntabilitas Kepala kampung harus mengundang masyarakat untuk mengikuti rapat untuk mengetahui Dana Desa yang di setiap pencairan dan Harus dilaporkan pertanggung jawaban kepada kepala Distrik, Bupati, dan diteruskan ke Gubernur. Atas aktivitasnya Penelitian yang diperoleh melalui sesi wawancara dengan kepala kampung yeruboi mengatakan bahwa:

".....Bagaimana saya berkomunikasi dengan masyarakat, sehingga saya dapat menyampaikan secara langsung maksud dan tujuan masyarakat mengenai pembanguan dan apabila masyarakat mengambil keputusan. saya sebagai kepala kampung siap untuk menyelesaikan segala bidang yang menyangkut dengan kepentingan masyarakat di kampung yeruboi.

2. Pengawasan

Pengawasan adalah semua aktifitas yang di dilaksanakan pemerintah kampung dan aparat, semua harus mengawasi pembangunan rumah yang sedang di bangun supaya berjalan dengan baik mencapai suatu tujuan bersama. Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan. Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-

kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan. Hasil Sekretaris Kampung mengatakan bahwa:

".....Peran aparat kampung dalam meningkatkan pengawasan sangat efektif dalam kampung yeruboi. sehingga kadang kami aparat kampung membantu kepala kampung untuk menyelesaikan masalah-masalah masyarakat dalam berbagai hal contohnya seperti masalah urusan pelanggaran-pelanggaran yang masyarakat perbuat.

3. Daya Tanggap

Responsiveness (daya tanggap) daya tanggap (*responsiveness*) merupakan keinginan para staf untuk membantu para konsumen dan memberikan pelayanan dengan tanggap. Daya tanggap dapat berarti respon atau kesiapan karyawan dalam membantu pelanggan dan memberikan pelayanan yang cepat dan yang meliputi kesiapan karyawan dalam melayani pelanggan, kecepatan karyawan dalam menangani transaksi. Hasil wawancara dengan *Kaur Umum* mengatakan bahwa:

".....Adapun program kerja yang saya usulkan kepada masyarakat dapat masyarakat membantu dalam memberikan usulan yang cepat dalam melayani peraturan pembangunan di kampung yeruboi sehingga masyarakat tanggap dengan usulan pembangunan kami".

4. Profesionalisme

Nilai yang kita perlu tingkatkan adalah Profesionalisme dalam bermasyarakat berorganisasi tahuka anda dari sekarang kita mulai mengembangkan profesionalisme maka beberapa waktu dari saat ini kita akan memiliki kehidupan yang berkualitas tinggi.

5. Partisipasi

Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat Partisipasi masyarakat sering kali dianggap sebagai

bagian yang tidak terlepas dalam upaya pemberdayaan masyarakat Dengan melihat partisipasi sebagai kesatuan dalam proses pemberdayaan masyarakat, akan dapat diketahui bahwa akar perkembangan pemikiran tentang partisipatif dalam pembangunan akan terkait dengan diskursus komunitas.

B. Sistem Dalam Meningkatkan Pembangunan Kampung.

1. Lembaga Eksekutif

Eksekutif merupakan pemerintahan dalam arti sempit yang melaksanakan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan haluan negara, untuk mencapai tujuan negara yang telah ditetapkan sebelumnya. Organisasinya adalah kabinet atau dewan menteri dimana masing-masing menteri memimpin departemen dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Secara umum arti lembaga eksekutif adalah pelaksanaan pemerintah yang dikepalai oleh kepala kampung yang dibantu sekretaris kampung, aparat, dan linmas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua bamuskam, beliau mengatakan bahwa; ".....Kekuasaan eksekutif dalam pemerintahan kampung di pegang langsung oleh kepala kampung dan aparat kampung. Oleh sebab itu masyarakat boleh mengajukan jenis pembangunan yang mereka inginkan pada setiap rapat Muskam. Tetapi kenyataan yang ada, setelah Dana Kampung sudah ada, Kepala Kampung dan Aparat kadang membuat kebijakan sendiri dalam pembangunan, Sehingga masyarakat selalu merasa belum ada pembangunan yang memberdayakan atau mensejahterkan mereka, baik di berbagai bidang pembangunan.

2. Membina Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kepemimpinan.

Mengingat kedudukan yang penting dalam kampung adalah masyarakat. Masyarakat senantiasa dituntut berpartisipasi dalam pembinaan kesadaran dalam meningkatkan pembangunan kampung. Masyarakat kampung memiliki hubungan sosial lebih luas dari pada pemerintah kampung, hal ini dapat dilihat dari pengetahuan, pemahaman dan ketaatan. Masyarakat meyakini kepercayaan pemerintahan kampung dalam kepemimpinannya. Peranan kepala kampung sebagai pemimpin informal di Kampung terlihat konkrit ketika memberi nasihat, saran, dan pendapat serta bagaimana ia mengendalikan perilaku masyarakat Kampung. Kepatuhan warga kepada pemimpin karena ia dipandang sebagai pengembal amanat leluhur, hingga apa yang diucapkannya akan dipatuhi termasuk larangan untuk tidak membicarakan hal-hal yang menyebabkan konflik, sehingga kepercayaan antara masyarakat dan pemimpin selalu terjaga. Masyarakat adat kampung memiliki keahlian atau pengetahuan tertentu melebihi orang kebanyakan, terutama pengikutnya, tidak menyimpan pengetahuan dan keahliannya itu untuk dirinya sendiri, melainkan berusaha untuk menyebarkan kepada orang lain, sehingga partisipasi tokoh masyarakat dalam membina kesadaran masyarakat terhadap keberlangsungan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil wawancara dengan kaur kesra mengatakan bahwa:

".....Dirinya yang dipercayakan untuk membantu kepala kampung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beliau sendiri menginginkan kepercayaan dari masyarakat untuk memahami pembangunan dalam kampung, sebab pembangunan yang ada dalam kampung ini adalah milik masyarakat

sendiri, maka kepercayaan yang sudah ada dari masyarakat dan pemerintah kampung itu perlu terbuka baik dari masyarakat dan juga pemimpin sehingga visi dan misi pembangunan pembangunan kampung bisa nyata dalam kampung kita.

3. Pendidikan Karakter

Karakter yaitu sebagai cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, maupun negara. Pendidikan karakter telah menjadi perhatian berbagai negara dalam rangka mempersiapkan generasi yang berkualitas, bukan hanya untuk kepentingan individu warga negara, tetapi juga untuk warga masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan karakter dapat diartikan sebagai the deliberate us of all dimensions of school life to foster optimal character development (usaha kita secara sengaja dari seluruh dimensi kehidupan sekolah/madrasah untuk membantu pembentukan karakter secara optimal. Pendidikan karakter memerlukan metode khusus yang tepat agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Di antara metode pembelajaran yang sesuai adalah metode keteladanan, metode pembiasaan, dan metode pujian dan hukuman.

KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil Penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka sebagai hasil kesimpulan secara umum yaitu; Akuntabilitas (kurang keterbukaan dari Pemerintah kampung), Pengawasan (kurang adanya pengawasan dari tingkat Distrik terhadap Dana kampung sehingga Keberhasilan Pembangunan kampung bagi kesejahteraan masyarakat belum terlaksana dengan baik), Partisipasi (kurang adanya kekompakan atau kerja sama dari

masyarakat), serta mental dan emosi dari pemerintah dan masyarakat yang mengakibatkan pembangunan tersendat. Secara bersama-sama selalu menjadi masalah dalam Sistem Pemerintahan guna meningkatkan pembangunan pada kampung Yeruboi.

DAFTAR PUSTAKAN

- Adi, Isbandi. Rukminto, 2001, *Pemberdayaan, pengembangan masyarakat dan intervensi komunikasi (pengantar pada pemukiman dan pendekatan praktis)*. Lembaga penerbit FE-UI, Jakarta.
- Kartasasmita, Ginanjar, 1996 *Pemberdayaan masyarakat konsep pembangunan yang berakar pada masyarakat*, ITB Bandung.
- LAN, 2003, "*Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*", Kajian Kinerja Kelembagaan LAN, Jakarta: Pusat.
- Miles, Mathew B, dan A, Michael Huberman, 2007, *Analisis Data Kualitatif*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Moleong, Lexy J, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Rosda, Bandung.
- Poerwadarminto, W J S, 2002, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Siagian, SP, 1991, *Administrasi Pembangunan*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sedarmayanti, 2000, *Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi Untuk Menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan*, Mandar Maju, Bandung
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, ALFABETA, Bandung.
- Tjokrowinoto, 1996, *Pembangunan, Dilema dan Tantangan*, PT. Pustaka Yogyakarta.
- Peraturan-peraturan
- Peraturan pemerintah No. 60 tahun 2014 "*Tentang Dana Desa*"
- PERMENDAGRI No. 114, Tahun 2015, *Tentang Rencana Pembangunan Desa*".
- Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015, *Tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah*.
- Peraturan Pemerintah No.72 tahun 2005, "*Tentang Desa*"
- Peraturan Bupati Biak Numfor No. 143 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Daerah.
- Undang-Undang No.32 Tahun 2004, "*tentang Pemerintahan Daerah*".
- Undang-Undang No.6 Tahun 2014, "*Tentang Desa*"